

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014)
- Agus Suntoro, *Kajian Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, (Jakarta: Komnas HAM, 2018)
- Aminuddin Salle, *Hukum Pengadaan Tanah: Untuk Kepentingan Umum*, (Jakarta: Kreasi Total Media, 2007)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
- Aristoteles, *Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2005)
- BPSDM Kementerian PUPR, *Modul 1 Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum*, (Bandung: Kementerian PUPR, 2017)
- Gunanegara, *Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Pelajaran Filsafat, Teori Ilmu dan Jurisprudensi*, (Jakarta: Tata Nusa, 2008)

- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990)
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap: Dari Klasik Sampai Postmodernisme*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015)
- Jarot Widya Muliawan, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2016)
- Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006)
- John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987)
- M. Philipus Hadjon, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.)
- Maria S.W Sumardjono, *Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Mudakir Iskandar Syah, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum: Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena Pembebasan Tanah Dan Pencabutan Hak*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015)
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *et.al, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016)
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004)
- Oloan Sitorus, *et.al, Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*, (Jakarta: CV. Dasamedia Utama, 1995)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008)

- Richard dan Ana Silviana, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Perkembangan, Hukum Pertanahan, Perolehan Tanah Dan Hak Tanggungan*, (Bandung: Bimedia Pustaka Utama, 2022)
- Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2013)
- Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2016)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Soemitro dan Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011)
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2005)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011)
- Sunarti Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)

Jurnal:

- Clement Salikin dan Mohammad Fajri Mekka Putra, “Larangan Pengasingan Tanah Dan Fenomena Perantaraan Penguasaan Tanah Pinjam Nama Di Indonesia”,

Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 6, No. 4 (2022): 2071–2078.
DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i4.3571>

Imam Koeswahyono, “Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Bagi Umum”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 1, No. 1 (2008): 1–19.

Mahmud Arifin, *et.al*, “Pengaruh Posisi Lereng Terhadap Sifat Fisika Dan Kimia Tanah Pada Inceptisols Di Jatinangor”, *Jurnal Soilrens* Vol. 16, No. 2 (2018): 37–44. DOI: <https://doi.org/10.24198/soilrens.v16i2.20858>.

Peter Mahmud Marzuki, “Batas-Batas Keabsahan Berkontrak”, *Jurnal Yuridika* Vol. 18, No. 3 (2019): 193–294. DOI: <https://doi.org/10.20473/ydk.v18i3.14398>

Putri Lestari, “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila”, *SIGN Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 2 (2020): 71–86. DOI: <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54>

Rikardo Simarmata, “Tumpang Tindih Penguasaan Tanah Di Wilayah Ibu Kota Negara ‘Nusantara’”. *Veritas et Justitia* Vol. 9, No. 1 (2023): 1–33. DOI: <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6504>

Urip Santoso, “Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 24, No. 2 (2012): 275–288. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16130>

Wayan Artana, *et. al*, “Pelepasan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum PT. Bali Pecatu Graha (Studi Kasus Kerkara Nomor: 65k/Pdt/2012/Ma)”, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No. 3 (2021): 664–670. DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4038.664-670>

Hasil Penelitian:

Gunanegara, “Pengadaan Tanah Oleh Negara Untuk Kepentingan Umum”.
Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006.

IKN-PUPR, Satgas Pembangunan Infrastruktur, *“Progres Pembangunan Ibu Kota Negara ‘Nusantara’”. Laporan Rapat Pembahasan Percepatan Pengadaan Tanah IKN Tahun 2023 Sekitar Sumber Daya Air Dan Cipta Kerja, 2023.*

Setiono, *“Rule of Law (Supremasi Hukum)”*. Tesis, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Herzein Inlandsch Reglement (HIR)

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum.

Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Permendagri No. 2 Tahun 1985 tentang Tata-Cara Pengadaan Tanah untuk Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 24/Pdt. G/2023/PN.Pnj.

Website/Internet:

DPRI RI Komisi II, “Pembebasan Tanah Di Kaltim Terkait IKN Masih Ada Masalah”.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43390/t/Pembebasan+Tanah+di+Kaltim+Terkait+IKN+Masih+Ada+Masalah>, diakses pada 23 Mei 2023.

Inspiratornews, “Heboh Proyek IKN Disetop Warga Gara-Gara Isu Lahan Belum Dibayar”, <https://inspiratornews.com/heboh-proyek-ikn-disetop-warga-gara-gara-isu-lahan-belum-dibayar/>, diakses pada 22 Februari 2024.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “UU Baru Pembebasan Lahan Lebih Pasti”. <https://pu.go.id/berita/uu-baru-pembebasan-lahan-lebih-pasti>, diakses pada 23 Mei 2023.

Kamus atau Encylopedia:

KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, (Indonesia: KBBI, 2024). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah>.

Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, (Indonesia: Kemendikbud, 2024) <https://kbbi.web.id/adil>

———, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemendikbud, 2024). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>

